

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pada saat ini, persaingan antar perusahaan semakin ketat sehingga saling berlomba untuk unggul dengan menggunakan strategi yang bertujuan mengambil hati para investor agar tertarik menanamkan modal di perusahaan. Persaingan ini jelas menjadi ancaman bagi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, sehingga perusahaan harus selalu mengembangkan strateginya agar tetap bertahan dan unggul. Salah satu cara agar perusahaan dapat unggul dan bertahan yaitu dengan meningkatkan nilai perusahaan melalui laporan keuangannya.

Seluruh perusahaan akan melaporkan kegiatan keuangannya di setiap periodenya dengan bentuk laporan keuangan. Salah satu bagian penting dalam laporan keuangan adalah laba, karena laba adalah parameter dalam mengukur kinerja perusahaan dan kinerja manajemen. Dalam pemilihan metode akuntansi yang akan digunakan oleh setiap perusahaan untuk melakukan penyusunan laporan keuangan, SAK memberikan kelonggaran. Kelonggaran yang diberikan dapat digunakan untuk menghasilkan laba yang berbeda-beda di setiap perusahaan.

Adanya laporan keuangan bertujuan menyampaikan ilustrasi tentang perolehan yang telah dicapai sebagai alat pertanggungjawaban manajemen. Akan tetapi, informasi yang diberikan terkadang tidak sinkron dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Kondisi seperti ini dapat dikatakan sebagai asimetri informasi karena antara manajemen dan pihak lain tidak memiliki akses dan

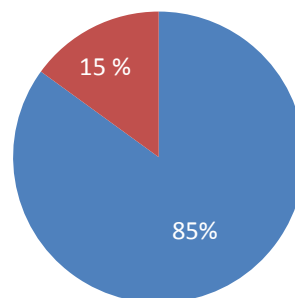
sumber yang memadai untuk mendapatkan suatu informasi yang digunakan untuk memantau perilaku manajemen, sehingga hal tersebut memicu manajemen untuk melaksanakan praktik manajemen laba (*earning management*).

Alasan mendasar timbulnya manajemen laba adalah harga saham suatu perusahaan secara signifikan dipengaruhi oleh laba, resiko dan spekulasi. Oleh karena itu, perusahaan yang labanya selalu mengalami kenaikan dari periode ke periode secara konsisten akan mengakibatkan resiko perusahaan meningkat, maka dari itu banyak perusahaan yang melakukan pengelolaan dan pengaturan laba sebagai salah satu upaya untuk mengurangi resiko. Manajemen perusahaan merupakan pihak yang paling berkepentingan melakukan praktik manajemen laba

Manajemen laba didefinisikan sebagai upaya suatu manajer perusahaan untuk mempengaruhi informasi laporan keuangan yang bertujuan untuk memperdaya *stakeholder* (Inggriani & Nugroho, 2020). Praktik legal dalam manajemen laba yaitu manajemen akan berusaha mempengaruhi angka laba yang tidak bertentangan ataupun yang boleh dilakukan dengan aturan pelaporan keuangan yang terdapat dalam Standar Akuntansi. Terdapat tiga jenis strategi manajemen laba, yaitu: 1) peningkatan laba yang dilakukan oleh manajemen pada periode kini dengan menurunkan tingkat pembebanan dibawah laba bersih, 2) dilakukannya pengurangan laba pada periode ini oleh manajer untuk melakukan penghapusan terhadap periode dengan kinerja buruk, strategi ini biasa disebut *big bath*, 3) dilakukannya pemerataan laba oleh manajer untuk mengurangi ketidakpastian atau fluktuasi laba. Tujuan utama sebuah perusahaan adalah memperoleh laba yang maksimal. Dengan memperoleh laba yang maksimal, maka

perusahaan dapat berkembang serta memberikan pengembalian yang menguntungkan bagi para pemilik perusahaan.

Gambar 1.1  
Kurva Pencatatan  
(sumber: lampiran 3 mini riset)



Gambar diatas merupakan mini riset yang dilakukan peneliti terhadap perusahaan yang melakukan praktik manajemen laba. Sebanyak 85% perusahaan melakukan praktik manajemen laba dengan cara memperkecil pelaporan labanya, sedangkan 15% nya melakukan manajemen laba dengan cara memperbesar pelaporan labanya.

Fenomena yang terkait dengan manajemen laba terjadi pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang melakukan praktik manajemen laba adalah PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (AISA), yaitu setelah adanya investigasi terhadap laporan keuangan periode 2017 dilakukan PT EY Indonesia ditemukan adanya dugaan penggelembungan pos akuntansi senilai Rp 4 triliun serta dugaan penggelembungan pendapatan senilai Rp 662 miliar dan penggelembungan lain senilai Rp 329 miliar pada pos EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi) ([www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)).

Adapun fenomena lain yang terjadi pada PT Kimia Farma Tbk. Manajemen kimia farma melaporkan laba bersih sebesar Rp 12 miliar dan sudah diaudit, namun Kementerian BUMN menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit uang, keuntungan yang sebenarnya hanya sebesar Rp 99,56 miliar atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 miliar atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Berdasarkan penyelidikan, bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan perusahaan tersebut telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu KAP tersebut juga membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut ([www.bisnis.tempo.co](http://www.bisnis.tempo.co)).

Salah satu motivasi manajemen laba yaitu meminimalkan pajak (Lolana & Dwimulyani, 2019). Perusahaan menganggap pajak sebagai beban, maka perusahaan akan melakukan usaha untuk meminimalisasi pembayaran pajak. Tindakan yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisasi pajak dapat berupa tindakan yang legal maupun ilegal menurut undang-undang atau disebut dengan *tax avoidance* dan *tax evasion*. Perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak cenderung memilih cara yang aman dengan menghindari pajak secara legal, yaitu melakukan *tax avoidance*.

Merujuk pada fenomena yang ada, hal tersebut menunjukkan bahwa praktik manajemen laba dalam hal pelaporan keuangan bukanlah suatu hal yang baru. Pada laporan keuangan tersaji gambaran tentang hasil akuntansi secara periodik yang menyediakan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, laporan kinerja, serta laporan arus kas dan perubahan posisi keuangan perusahaan.

Oleh karena itu dengan adanya penyimpangan manajemen laba dan *tax avoidance* maka diperlukannya untuk menerapkan *good corporate governance* (GCG) (Darma et al., 2019). *Good corporate governance* dapat memotivasi perilaku manajerial dalam pembuatan laporan keuangan dengan benar untuk meningkatkan bisnis, dan secara langsung dapat mengendalikan perilaku manajer.

*Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan GCG sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus perusahaan, pihak kreditor, pemerintan, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya dan pertumbuhan integritas perusahaan. *Corporate governance* merupakan bagian penting dalam pengelolaan perusahaan yang memiliki prinsip *transparency, responsibility, fairness, dan accountability* sehingga perusahaan yang bertata kelola dengan baik semestinya akan dapat mengurangi masalah agensi. Agar semua prinsip-prinsip yang tercakup dalam *good corporate governance* dapat berjalan secara efektif maka diperlukan sistem pengawasan dan pengendalian sesuai aturan yang berlaku untuk mewujudkan kehidupan bisnis yang bersih, sehat, dan bertanggungjawab. Secara konseptual pengawasan dan pengendalian ini dapat terlaksana dengan baik apabila dilakukan oleh orang-orang yang memiliki independensi dengan kepentingan manajer perusahaan (Sulistyanto, 2018).

Artinya, orang-orang ini tidak memiliki ikatan kepentingan yang dapat mengakibatkannya tidak bebas dari tekanan dan intervensi manajerial. Seluruh tindakan dan keputusan yang dibuatnya harus lepas dari kepentingan manajer, apalagi jika hal ini menyangkut kepentingan *stakeholder*. Untuk membangun

sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif dalam suatu perusahaan ada dua pihak yang diperlukan, yaitu komisaris independen dan komite audit (Sulistyanto, 2018). Meski setiap pihak mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda, namun pada prinsipnya kedua pihak ini memiliki tujuan yang serupa, yaitu mewujudkan kehidupan bisnis yang bersih, sehat, dan bertanggung jawab.

Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan perusahaan dan memberikan nasihat kepada direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang perseroan. Proporsi dewan komisaris yang tinggi akan meminimalkan kecurangan dalam pelaporan perpajakan sehingga meningkatkan integritas nilai informasi keuangan (Lolana & Dwimulyani, 2019). FCGI menyatakan bahwa dewan komisaris sebagai inti *corporate governance* (tata kelola perusahaan) yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Hasil penelitian yang dilakukan (Ainiyah & Wahidahwati, 2020) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Inggriani & Nugroho, 2020) menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Oleh karena itu dewan komisaris independen kurang mampu menjadi mekanisme *corporate governance* yang dapat mengurangi ketidakselarasan kepentingan antara manajemen dengan pemilik pemegang saham.

Komite audit merupakan pihak yang bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris mengenai kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan. Dalam kaitannya dengan manajemen laba, perusahaan yang memiliki komite audit mampu meminimalisir tindak kecurangan yang dilakukan manajer melalui fungsi pengawasan terhadap sistem pelaporan keuangan. Hasil penelitian (Dewi & Khoiruddin, 2016) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Giovani, 2019) menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal tersebut diduga karena adanya pengangkatan komite audit hanya sebatas pemenuhan regulasi dan belum dianggap berdasarkan kebutuhan perusahaan yang menyebabkan komite audit masih belum bisa menunjukkan posisi kedudukan yang berdiri sendiri yang terkadang masih dapat terpengaruh atau bahkan tunduk pada dewan komisaris.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, masih menunjukkan adanya *research gap*. Adanya perbedaan pendapat pengaruh *good corporate governance* terhadap manajemen laba pada penelitian terdahulu, maka penulis tertarik melakukan penelitian terkait manajemen laba. Peneliti tertarik untuk mengembangkan penelitian ini dengan memperbarui periode penelitian, menambahkan adanya variabel lainnya, dan juga penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sedangkan dalam penelitian kali ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor

makanan dan minuman. Variabel independen yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dewan komisaris independen dan komite audit, serta *tax avoidance* sebagai variabel intervening.

Peneliti berfokus pada perusahaan yang bergerak di sektor industri barang konsumsi. Terdapat beberapa alasan yaitu, pertama perusahaan manufaktur sektor industri sub sektor makanan dan minuman memiliki potensi besar akan produk yang akan ditawarkan. Hal ini disebabkan produk yang ditawarkan merupakan produk yang dibutuhkan oleh orang banyak. Kemudian, sub sektor makanan dan minuman ini menawarkan kebutuhan dasar sehingga membuat konsumen akan melakukan pembelian secara berulang. Sub sektor makanan dan minuman menjadi salah satu sektor manufaktur andalan yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut dapat tercermin dari hasil pencapaian kinerjanya dan pergerakan sahamnya selama ini tercatat konsisten dan positif, baik dalam peningkatan produktivitas, investasi, ekspor dan penyerapan tenaga kerja. Industri makanan dan minuman juga menjadi salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap investasi nasional, industri ini menyumbang hingga Rp56,60 triliun pada tahun 2018 dan tubuh sebesar 7,91% yang melampaui pertumbuhan ekonomi nasional diangka 5,17% (kememperin.go.id).

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya serta latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba dengan *Tax Avoidance* sebagai Variabel Intervening”**



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba?
3. Apakah *tax avoidance* memediasi hubungan antara dewan komisaris independen dengan manajemen laba?
4. Apakah *tax avoidance* memediasi hubungan antara komite audit dengan manajemen laba?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap manajemen laba
2. Mengetahui pengaruh komite audit terhadap manajemen laba
3. Mengetahui hubungan mediasi *tax avoidance* antara dewan komisaris independen dengan manajemen laba.
4. Mengetahui hubungan mediasi *tax avoidance* antara komite audit dengan manajemen laba.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

1. Dapat memperkaya konsep dan teori yang mendukung ilmu pengetahuan akuntansi, khususnya terkait “Pengaruh *Good Corporate Governance*

terhadap Manajemen Laba dengan *Tax Avoidance* sebagai *variabel intervening*”.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan dapat memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis untuk mengembangkan pengetahuan demi kemajuan dunia pendidikan.

**b. Manfaat Praktis**

1. Bagi Perusahaan

Perusahaan dapat mengetahui bagaimana kewajiban yang seharusnya dengan memperhatikan setiap dampak dari kasus berdasarkan fenomena yang dibahas pada penelitian dan yang terjadi secara umum. Serta perusahaan diharapkan akan memberikan pandangan pemikiran yang lain dalam memahami manajemen laba dan *tax avoidance*.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan pemikiran untuk memperbaiki keterbatasan-keterbatasan yang ada pada penelitian ini.